

Pengaruh Penerapan SIM Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Ruhama Saleh¹, Syarifah Nurhasnah², Andi Nilwana³, Pratiwi Ramlan⁴

^{1,2,3,4}Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan Indonesia
ruhamasaleh@yahoo.co.id¹, ifhaabdullah@gmail.com²,
andi_nilwana@yahoo.com³, pratiwiramlan@yahoo.com⁴

Abstrak Tujuan Penelitian untuk : (1) Menganalisis pengaruh SIM Keuangan terhadap laporan keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang; (2) Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi SIM Keuangan; dan (3) Menganalisis dampak Laporan Keuangan yang Berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif tabel persentase dan analisis statistik regresi linear sederhana dengan Skala likert dan uji-t. Untuk menguji pengaruh SIM Keuangan terhadap laporan keuangan: (1) tabel persentase: intelegen keuangan 51,43%; audit keuangan 77,14%; transaksi keuangan 91,42%; dan peramalan dan perencanaan keuangan 62,85 secara kumulatif 70,71%; (b) statistic regresi linier sederhana menunjukkan 73,30% kemampuan menjelaskan variabel X terhadap variabel Y signifikan pada taraf 0,05 dengan probabilitas 0,00000 ($t_{hit} 4,12 > t_{tab} 2,73$) $H_1 =$ diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi manajemen keuangan, yaitu: profesionalisme aparat 80,00%; dan sistem komputerisasi dengan 20,00%. Dampak laporan keuangan yang berkualitas, yaitu: menyajikan informasi keuangan: keandalan informasi dan mudah dipahami oleh stakeholders.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Laporan Keuangan.

I. PENDAHULUAN

Teknologi informasi saat ini semakin memainkan peran yang signifikan dalam organisasi/instansi. Dengan ini mudahnya informasi diakses dari pihak ke pihak lainnya. Teknologi informasi tidak lepas dari perangkat komputer, Teknologi Komunikasi dan Manajemen. Tiga hal ini dikatakan sebagai

jantung suatu teknologi informasi.

Kemajuan Teknologi Informasi, khususnya pada dimensi Sistem Informasi Manajemen merupakan instrumen strategis dalam mengelola keuangan daerah secara professional, transparan, akuntabel dan proposional Sistem Infomasi keuangan dengan tiga tugas pokok: (1) mendeteksi

keuangan yang akan datang, (2) membantu memperoleh dana tersebut, dan (3) dikontrol penggunaannya.

Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah, menetapkan kebijakan, dan melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri. Pada dimensi yang lain, tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan yang lebih optimal dan representatif. Salah satu indikator yang sangat mempengaruhi optimalisasi kinerja keuangan adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: (1) PP No tahun 2005 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan; (2) PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (3) PP no 56 tahun 2005 tentang sistem informasi manajemen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas maka dapat dijelaskan Pemerintah Daerah berkewajiban memanfaatkan dan mengembangkan untuk kemajuan teknologi informasi dengan kemampuannya terkait

menelola suatu keuangan informasi tentang keuangan kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem manajemen akuntansi dan keuangan daerah. Diperlukan sistem yang akurat dalam mengelola keuangan sekaligus menyusun laporan keuangan daerah yang tepat waktu, akurat, transparan dan akuntabel

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuanganyang handal akan mempercepat proses dan penyajian informasi keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu pemerintah daerah seyogianya memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas mengelola keuangan daerah, dan memberikan akses informasi tentang kondisi dan komposisi struktur keuangan daerah kepada publik secara akurat, transparan, dan akuntabel.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan merupakan sebuah piranti lunak teknologi komputerisasi (hardware) yang dibangun dalam bentuk program, sehingga memudahkan penginputan data dan mempercepat proses pengolahan data yang pada gilirannya dapat menyajikan data

yang akurat, dan diakses oleh stakeholders pemangku kepentingan.

Laporan kondisi keuangan dalam menggambarkan kondisi keuangan dalam mengelola organisasi menurut Harahap (2010: 105). Dalam perspektif para auditor dan analis, laporan keuangan merupakan entry point dalam menilai prestasi, kondisi dan komposisi struktur keuangan sebuah organisasi. Pada posisi pengguna internal, dengan laporan keuangan alat pengendalian, evaluasi dan pengawasan kinerja dalam organisasi. Sedangkan pada posisi pemakai yang ada di luar untuk melaporkannya dengan mempertanggungjawabkan dan mengambil keputusan.

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan akuntansi pemerintahan merupakan pencatatan dan penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena sudah menjadi sebuah kewajiban dan keharusan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun dan menyiapkan laporan keuangan tentang barang yang dikelola dengan melaksanakan suatu penganggaran. Pemerintah daerah melihat perlunya melakukan pengembangan kapasitas dan kemampuan sumber daya

manusia dengan mempersiapkan aparatnya untuk menghadapi perubahan, dan terwujudnya pengelolaan khas keuangan di daerah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting untuk mengoptimalkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju peradaban baru birokrasi good governance.

Dalam RPJM Tahun 2010-2014 dan Restra tahun 2010-2014 deputi pengawas bidang penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan suatu pengembangan Sistem Informasi Manajemen adalah suatu kegiatan yang mendukung tercapainya suatu indikator kinerja "Meningkatnya BPK tingkat opini terhadap (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) LKPD".

Merupakan saruan kerja perangkat Daerah yang diberi tanggung jawab dan kewenangan oleh Bupati untuk mengurus dan mengelola keuangan daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 dengan fungsi pokoknya yaitu mengelola administrasi keuangan daerah Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini, Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sudah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dalam mengelola keuangan

daerah serta menyusun pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun 2005 hingga sekarang. Dengan banyak manfaat dengan ditawarkannya penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dengan kecepatan pemrosesan penyiapan laporan dan transaksi penyimpanan data, serta keakuratan pemrosesan yang lebih rendah dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah. Disamping itu penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang juga dihadapkan pada beberapa masalah dan kendala, antara lain: (1) jaringan internet yang terganggu pada saat cuaca buruk; (2) Ketidacukupan perangkat keras komputer; (3) Keterbatasan daya dan kemampuan perangkat lunak program yang digunakan; (4) Keterlambatan pemutakhiran data; dan (5) Keterbatasan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia aparat. Secara empirik masalah dan kendala tersebut menjadi penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan daerah.

Sehubungan dengan kelayakan masalah rendahnya kualitas laporan keuangan daerah yang diduga sementara disebabkan oleh penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah yang cenderung

belum dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Fenomena tersebut juga telah dikaji dan dianalisis oleh beberapa peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, yaitu: fenomena tersebut juga telah dikaji dan dianalisis oleh beberapa peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data "regresi linear berganda", yaitu: (1) Ridwan (2009) mengenai Pengaruh penerapan aplikasi suatu sistem yang *termanage* untuk memperoleh laporan yang baik pada SKPD pemerintah Indramayu; (2) Agus Suseno (2008) tentang Analisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasik Malaya; (3) Cipmawati Mohune (2012) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Gorontalo; (4) Angga Dwi Permadi (2013) tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah, studi kasus di Dinas Bina Marga Prov. Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin meneliti dengan judul "Pengaruh Sistem

Informasi Manajemen Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang” dengan tujuan Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kabupaten Enrekang, Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Sistem Informasi Manajemen daerah dan Untuk menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada (Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah) di Kabupaten Enrekang.

A. Konsep Sistem Informasi Manajemen

Memiliki sistem yang saling terkait dengan batas sejajar untuk bekerja sama untuk bisa mencapai suatu tujuan (O brien dan Markas, 2009) SIM dalam artian yang sederhana dapat dijelaskan sistem yang berbasis teknologi untuk penyediaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan (Sutono, 2007). SIM merupakan pengkombinasian antara perangkat keras dan lunak sesuai dengan kebijakan yang tercantum dengan baik dengan menyimpan berkas file serta menyebarkan berita atau informasi dalam organisasi

terkait menurut O'Brien dan Markas, 2009.

Adapun sistem yang terkait dengan 3 aktivitas sebagai berikut: dasar di dalamnya, yaitu: *input, proses dan output*. Dengan adanya permasalahan ini mampu mengendalikan dan mengambil keputusan serta menciptakan suatu bahan melalui bahan yang sudah ada dengan berbagai uji coba yang diperoleh dalam suatu organisasi. membuat sesuatu dengan memiliki arti. Adapun keluaran dimaksudkan untuk memberi suatu informasi dengan memproses suatu aktivitas yang ada. SIM membutuhkan adanya umpan balik antara sesama sebagai dasar untuk mengevaluasi dan memperbaiki tahap penginputannya menurut Sutono, 2007.

Sistem ini memiliki keasatuan yang terarah untuk mencapai tujuan yang terikaat dengan komponen yang membantu bagian yang harmonis yang saling berhubungan dan saling mendukung dalam keberhasilan.

SIM Keuangan (SIMK) adalah perangkat manual aplikasi yang mengintegrasikan keseluruhan proses dengan mengelola suatu keuangan dari (RKA), Penyusunan Laporan Keuangan (SAI) dan penyusunan Anggaran (DPA) Sistem informasi keuangan mempunyai tiga tugas pokok: (1) mengidentifikasi kebutuhan uang

yang akan datang; (2) membantu perolehan dana tersebut; dan (3) mengontrol penggunaannya. Sedangkan Prinsipnya SIMK, yaitu: (a) adanya peranan yang perlu dijelaskan dalam membuat kebijakan; (b) Ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat; (c) terbuka dalam merencanakan dan melaksanakan pelaporan suatu anggaran; dan (d) kebijakan yang terikat dengan baik.

SIMK dikembangkan dengan tujuan: (1) memberikan yang terbaik dengan meningkatkan laporan keuangan agar laporan dapat akurat dan tepat waktu dipertanggungjawabkan dengan menghubungkan sektor di jenjang yang paling atas; (2) Mendukung efisiensi, efektifitas dan kelancaran penyusunan laporan keuangan; (3) mengupayakan tingkatan laporan keuangan. Sebagaimana sistem lainnya dengan sistem ini biasa juga dilengkapi informasi yang berasal dari lingkungan dengan *Financial intelligence subsystem*. SIMK merupakan (RKA-KL), tersusunnya Anggaran (DIPA), menerbitkan SPM serta penyusun pelaporan keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan. SIMK memiliki 3 tugas Pokok : (1) mengecek kebutuhan yang akan datang, (2) untuk membantu mendapatkan dana tersebut, dan (3) adanya

pengontrolan penggunaannya (Akbar, 2002: 100).

SIMK mempunyai beberapa sub, yaitu: (1) badan keuangan. Untuk mendeteksi darimana asal uang yang dimana dapat diperoleh dari pemegang saham dengan masyarakat terkait keuangan Menurut Kadir (2003: 94). Sumber eksternal dapat diperoleh dari pemegang saham, dan masyarakat keuangan. Tujuan dari sumber eksternal ini adalah untuk menambah dana bagi perusahaan; (2) Subsistem audit keuangan, hal ini berfungsi memeriksa dan melakukan suatu auditing keuangan yang bisa digunakan oleh dalam organisasi; (3) proses transaksi yang tersistem. Sistem ini SIM akuntansi dan (4) sistem yang diramalkan dan dengan merencanakan suatu keuangan. Sistem ini kegunaannya untuk mengevaluasi kinerja dan memantau bisnis dan menganalisis suatu pendanaan.

B. Konsep Kualitas Laporan Keuangan

“Myer mengatakan laporan keuangan dengan mengemukakan dua daftar yang untuk laporan keuangan yaitu : daftar yang disusun pada akhir periode. Dari dua daftar tersebut daftar perhitungan keuangan dan daftar laba rugi”. Dalam Standarnya keuangan akuntansi dalam keterangan adalah laporan rugi labanya segala sesuatu

keterangan yang terlapor dalam arus khas”.

Jadi pelaporan keuangan dapat dilaporkan bagaimana kondisi keuangan sampai saat ini sampai jangka waktu yang ditentukan pelaporan keuangan berasal dari proses perhitungan akuntansi antara keuangan atau suatu aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang mementingkan aktivitas atau data.

Pelaporan Keuangan memiliki ringkasan dari semua transaksi pertahun kepada bersangkutan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) revisi no 1 tentang penyajian data laporan keuangan dengan komponen-komponen : Neraca I yaitu suatu laporan data keuangan perusahaan pada waktu tertentu; (2) data hasil usaha dari biaya selama satu periode akuntansi; (3) laporan ekuitas adalah data persamaan yang terjadi selama perubahan data pada akhir periode; (4) laporan arus kas keluar dan masuk berupa investasi; (5) catatan laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bahwa karakteristik yang memiliki ciri khas dalam memberi informasi yang berguna bagi penyusun

laporan keuangan. Ada 4 sifat kualitatif yaitu: (1)berisikan informasi yang sangat mudah dipahami; (2).informasi yang mempengaruhi kebijakan ekonomi dimasa lalu (3) Keandalan. Informasi yang diyakini dan dipercaya kebenarannya; (4) Dapat Dibandingkan. Pemakai dapat menggunkan data tersebut untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antar priode

C. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Profesionalisme adalah sifat yang mencerminkan suatu profesi.”Sedangkan memiliki tanggungjawab yang terkhusus bagi yang memiliki kekuasaan. Disatukannya profesi seseorang dari latar belakang sesuai dengan keahliannya. Orang yang bergabung dengan kelompok profesi memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki kebanyakan orang lain. Adanya aturan suatu kode etik dengan menyatakan komitmen dari kesejahteraan masyarakat. (Cruess & Cruess) (dalam Siagian, 2005: 90).

Profesi secara Umum yaitu :(1) pengetahuan khusus yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan dan pengalaman; (2) memiliki standar yang tinggi (3) adanya pengabdian kepada masyarakat, artinya

mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Adapun ciri-cirinya yaitu adanya pencerminan bagi yang berada di puncak. Tuntutan yang berat beserta tantangan yang harus dicapai. Begitupun di pihak lain ada perilaku yang baik dalam melaksanakan kepentingan masyarakat secara jelas dengan bidang kehidupan dan kegiatan dalam penerapan standar profesional dengan pwngharapan menciptakan kualitas masyarakat semakin baik (Siagian, 2005: 100).

Kepemimpinan yaitu memberikan arahan kepada bawahan untuk melakukan sebuah pekerjaan dalam hal ini dapat diartikan, memegaruhi dan mengarahkan para bawahan menurut (Freeman dan Gilbert, 1995). Adapun kepentingan kepemimpinan ada dua yaitu: (1) pemrosesan; dan (2) sebagai atribut. Digunakan hak kekuasaan dalam memimpin dan untuk mempertegas apa yang hendak dicapai suatu organisasi sehingga termotivasi dalam organisasi. Sebagai atribut artinya memiliki hak dan menyatakan inilah pemimpin dengan memiliki suatu karakter kepemimpinan. Dengan ini kepemimpinan memiliki arti seseorang yang mampu memrintah yang tegas kepada orang lain atau bawahannya, sehingga orang yang menjadi bawahannya dapat

menerimanya sebagai pimpinan (Sedarmayanti, 2003: 150).

Sejalan hal tersebut, maka Teori X dan Teori Y sebagaimana yang dirumuskan oleh McGregor. Strategi yang dimiliki pemimpin terkait sifat manusia. Sebagai pengalamannya McGregor ada dua yang dapat disimpulkan yakni. Teori X yang beranggapan : (1) manusia malas dan tidak menyukai suatu pekerjaan (2) manusia yang harus diawasi dan diarahkan dan diancam untuk mencapai tujuan suatu organisasi (3) biasanya manusia lebih menyukai apabila menghindari dari suatu pekerjaan untuk menghindari tanggu jawab, adapun Teori Y : (1) kodrat dalam bekerja bermain dan istirahat; (2) adapun pengawasan dan hukuman yang diberikan bukan salah satu cara untuk mencapai suatu organisasi; (3) terikatnya dalam tujuan dan fungsi dari penghargaan yang diperolehnya melalui prestasi; (4) biasanya manusia layak belajar tetapi tidak untuk menerima hanya merasa yang dimiliki itu memiliki suatu tanggung jawab (5) ada yang dapat dituangkan baik itu kecerdasan yang dimiliki; (6) potensi yang dimiliki hanya sebageian yang dapat diterima dalam kondisi kehidupan industri modern (Fernada, 2003: 90).

II. METODE PENELITIAN

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode survei. Adapun survei yang dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah disediakan, sehingga tidak seluruh objek diteliti, tetapi biasanya perwakilan sebagai representasi dari seluruh objek tertentu (Notoatmodjo, 2012: 35).

Adapun Populasinya ini adalah pegawai yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang berjumlah 35 orang. Untuk menentukan sampel merujuk pada rumusan yang diungkapkan oleh Arikunto (2008: 56) yang mengatakan bahwa apabila jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka keseluruhan populasi tersebut dapat dijadikan sampel. (sampel jenuh). Dengan demikian, maka jumlah sampel yang dijadikan responden penelitian adalah 32 orang. Sedangkan yang dijadikan sebagai informan yaitu sebanyak 3 orang: Kepala Badan 1 orang; Sekertaris Dinas 1 orang; dan Kepala Bidang Pelaporan Keuangan 1 orang.

Adapun jenis data yang digunakan adalah data Sekunder dan Primer, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Teknik analisis data yaitu analisis

infrensial, regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Kualitas Laporan Keuangan

a. Subsistem intelejen.

Penerapan subsistem intelejen keuangan (SIK) sebagai salahsatu dimensi system informasi manajemen keuangan, khususnya dalam hal identifikasi sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, bahwa dari jumlah 35 responden, terlihat ada 26 responden atau 74,29% yang memberikan jawaban pada kategori “teridentifikasi”, dan 9 responden atau 25,71% yang memberikan jawaban pada kategori “kurang teridentifikasi”.

Sejalan dengan penerapan SIK yang bertujuan untuk dikumpulkannya data yaitu Bank, dan agen pemerintah. Subsistem ini memonitor denyut nadi penerimaan dan pengeluaran atau pemanfaatan anggaran pembangunan dan belanja bai secara nasional, regional dan local. Selain itu subsistem intelejen keuangan juga diharapkan dapat memberikan ke eksekutif suatu informasi mengenai trend yang dapat mempengaruhi kondisi organisasi. Dan sangat berperan dalam sumber modal dan investasi.

Penerapan subsistem intelegen keuangan sebagai salahsatu indicator system informasi manajemen keuangan dalam hal ini control keuangan bahwa dari jumlah 35 responden, terlihat ada 28 responden atau 80,00% yang memberikan jawaban pada kategori “terkontrol”, dan 7 responden atau 20,00% yang memberikan jawaban pada ketegori “kurang terkontrol”, Karena fungsi subsistem intelegen keuangan untuk mengontrol keuangan di semua organisasi, sangat dibutuhkannya informasi dalam melancarkan arus ini. Mencari tambahn dana dan investasi. Untuk mencapai tugas ini adanya data pemegang saham dan masyarakat keuangan. Hai ini juga mengumpulkan informasi dan data pemerintah. Sebagian berasal dari pemerintah federal dan sebagian dari pemerintah Daerah dan Negara.

Intelegensi Keuangan organisasi Memiliki aktivitas yang baik berkembang terkait masyarakat keuangan. Ada dua arus informasi yaitu: (1) informasi formal, dari bentuk cetakan atau melalui database; (2) pentingnya suatu lingkungan perekonomian mempengaruhi organisasi dari manajemen puncak ini ini ingin tetap menggunakannya.

Penerapan subsistem intelegen keuangan sebagai salahsatu indicator system

informasi manajemen dalam hal penulisan dan penyusunan laporan keuangan, dari jumlah 35 responden semuanya atau 100,00% memberikan jawaban pada kategori “tertulis”.

b. Audit keuangan

Penerapan subsistem audit keuangan sebagai salahsatu indicator system informasi manajemen keuangan dalam konteks efektivitas pemeriksaan keuangan. Dari jumlah 35 responden, terlihat ada 28 responden atau 80,00% yang memberikan jawaban pada kategori “efektif”, dan 7 responden atau 20,00% yang memberikan jawaban pada ketegori “kurang efektif”.

Sebagai penguatan dan pembenaran terhadap jawaban responden yang pada umumnya menilai bahwa dalam rangka menerapkan prinsip audit keuangan, pegawai telah melakukan pemeriksaan keuangan, maka peneliti melalukan pengamatan terhadap kegiatan pemeriksaan dan pemerosesan data keuangan, bahawa: pegawai yang terlibat dalam penerapan system informasi manajemen, khususnya pada bidang audit keuangan secara proporsional telah melakukan kegiatan pemeriksaan keuangan secara efektif (dari pengamatan pada 05 Oktober 2016).

Sejalan dengan hal tersebut, organisasi harus melaksanakan suatu pemeriksaan dan pengendalian terhadap biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional organisasi. Ada 3 fungsi pengendalian biaya: (1) fungsi planing merencanakan susunan rencana; (2) Fungsi Organizing pada tingkat operasional; (3) Fungsi controlling melalui evaluasi terhadap tujuan yang telah dicapai. Setiap organisasi tetap ingin berjalan dan mampu mempertahankan eksisnya yang dituntut bekerja seefisien dan sefektif mungkin. Untuk itu dibutuhkan tingkat kemampuan manajemen untuk mengendalikan organisasi terutama dalam meningkatkan kualitas.

Perbaikan data keuangan sebagai salahsatu indicator audit keuangan dalam penerapan system informasi manajemen keuangan, bahwa dari jumlah 35 responden, terlihat ada 26 responden atau 74,29% yang memberikan jawaban pada kategori “diperbaiki”, dan 9 responden atau 25,71% yang memberikan jawaban pada kategori “kurang diperbaiki”.

Audit internal ini mampu melaksanakan aktivitas internal auditing sebagai penilaian langsung atas setiap bentuk suatu pengawasan yang semakin kompleks. Auditing internal ada 4: (1) keuangan; (2) operasional; (3) persetujuan desain; dan (4)

sistem pengontrolan. Semua auditor dapat melaksanakan aktivitas tersebut..

Auditing eksternal melakukan audit keuangan khusus dan terpisah apa yang dikerjakan.

Auditing Operasional dilakukan secara akurat. Sistem yang digunakan yang tidak melibatkan penggunaan komputer. Sedangkan Auditing persetujuan yang bersifat keluar.

c. Pemrosesan transaksi

Pencatatan data keuangan sebagai salahsatu indikator audit keuangan, bahwa dari jumlah 35 responden, secara keseluruhan memberikan jawaban pada kategori “tercatat”, catat pencatatan yang memuat dalam urutan yang bersifat formal dalam system manual. Register berfungsi sebagai buku harian atau pengganti jurnal dalam bentuk catatan keuangan. Buku besar sebagai perkiraannya satuan suatu keuangan yang menekankan pada status perkiraan.

Pencatatan laporan keuangan dari hasil proses transaksi sebagai laporan keluaran (Laporan keuangan). Sejumlah besar dokumen operasional yang diperoleh dari sistem pemrosesan transaksi. Beberapa dari dokumen untuk menggenjot suatu tindakan. Dengan catatan tindakan yang diselesaikan. Dokumen organisasi untuk pemrosesan

lebih lanjut. Sejalan dengan hal tersebut, dikodekan dalam buku besar dengan transaksi akunting yang diklasifikasikan..

Penerapan subsistem intelegen keuangan sebagai salahsatu dimensi system informasi manajemen keuangan, khususnya dalam hal identifikasi sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, bahwa dari jumlah 35 responden, terlihat ada 29 responden atau 82.85% yang memberikan jawaban pada kategori “cepat”, dan 6 responden atau 17,15% yang memberikan jawaban pada ketegori “kurang cepat”.

Tujuan percepatan pemerosesan data transaksi, yaitu: (1) pencatan setiap transaksi; (2) dengan mempercepatnya suatu proses di dalam suatu organisasi; (3) Menyediakan informasi yang tepat waktu dan akurat; (4) Meningkatkan kinerja dan layanan organisasi. Sistem Pemerosesan Transaksi dapat dilakukan secara cepat terkait dengan komponen-komponen, yaitu: (a) Transaksi dicatat pada dokumen sumber, selain menyediakan catatan dokumen yang berfungsi : (b) Memicu meng-otorisasi operasi fisik; (c) Memantau arus fisi; (d) Mencerminkan akuntabilitas atas tindakan yang diambil; (e) menjaga kelengkapan data; (f)menyediakan data untuk informasi di laporan kuangan.

Informasi tentang arus kas suatu organisasi sangat berguna bagi pemakai laporan keuangan organisasi dengan menilai kebutuhan organisasi dalam kegunaan arus kasnya. Dalam pengambilan suatu keputusan menyusun satu laporan kas, Investasi dan Aktivitas Pendanaan. Arus kas adalah istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan arus kas (kas yang diterima) dari kegiatan operasi.

d. Peramalan dan perencanaan keuangan.

Fungsi Perencanaan, maka bagi manajer keuangan fungsi perencanaan ini berarti ia harus melakukan perencanaan keuangan yang bersifat rasinal. Untuk melakukan suatu perencanaan maka terlebihdahulu lebihtepatnya membuat perkiraan apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Adapun perencanaan keuangan memperkirakan bagaimana posisi suatu keuangan

Bagian dari perencanaan keuangan yaitu perencanaan organisasi (Corporate Planning). Yang diharapkan organisasi atau instansi pemerintah menghindari kesalan dari hasil keputusan meningkatkan kinerja dari pengorganisasia. Keuangan yang direncanakan dalam memberikan pertimbangan keuangan yang optimal dan rasional dalam pencapaian target

sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya bagi organisasi baik yang berkaitan dengan sumber maupun penggunaan keuangan organisasi.

Dalam membuat suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik, suatu organisasi akan berusaha menciptakan rasionalisasi penetapan target penerimaan dalam suatu periode, sehingga semua program penggunaan keuangan memiliki tujuan dan arti yang jelas. Kejelasan bagi organisasi melihat proses yang panjang baik jangka panjang dan pendek. Konsep perencanaan keuangan tidak baik dalam jangka pendek.

Adanya kesesuaian antara realisasi penerimaan keuangan dengan target merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan organisasi (corporate planning). Diharapkan perencanaannya organisasi dapat menghindari kesalahan-kesalahan, menghasilkan keputusan yang terbaik yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja dari suatu organisasi. Realisasi target penerimaan keuangan dimaksudkan untuk mempekuat posisi dan kondisi keuangan di masa yang akan datang. diperkirakan kondisi organisasi perlu menambah dana dari luar, bagaimana profitabilitas organisasi dimasa yang akan datang.

Sebelum menyusun rencana keuangan, maka ada beberapa hal yang harus dipahami dalam suatu organisasi. Salah satu hal penting yang harus dianalisis adalah arus kas suatu organisasi. Mengalirnya dana organisasi atau modal kerja. Arus dana adalah cerminan bagaimana sistem dana yang mengalir pada suatu organisasi. Dapat diketahui aliran ini, dengan pihak keputusan dalam penetapan dana suatu organisasi organisasi, darimana akan dibiayai dengan penggunaannya.

Dalam membuat suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik, suatu organisasi akan berusaha menciptakan semua itu memiliki tujuan dan arti yang jelas. Dengan kejelasan organisasi akan proses yang berlangsung dalam jangka pendek dan panjang. Keuangan yang tidak bagus akan terlihat di jangka pendek.

Analisis regresi linier sederhana dipergunakan untuk menguji hipotesis Pengaruh Sistem Informasi manajemen keuangan sebagai variabel berpengaruh (X) Terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel terpengaruh (Y), secara statistic hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H_0 = hipotesis di tolak

H_1 = hipotesis di terima

Komputasi yang dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana,

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 40.1131 + 0,1352 X + E$$

Berdasarkan koefisien regresi variabel bebas (X) dengan nilai bi, persamaan regresi dapat diartikan bahwa kualitas laporan keuangan daerah (Y) bertambah sebanyak nilai bi kali nilai X, jika variabel lainnya dalam keadaan konstan. Untuk melihat keberartian koefisien regresi tersebut, dilakukan pengujian terhadap persamaan regresi guna mengetahui apakah persamaan tersebut dapat digunakan untuk menduga Pengaruh System Informasi manajemen keuangan (X) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

Hasil pengujian perhitungan menunjukkan koefisien determinan (R^2) 0,7350 untuk variabel bebas, artinya hanya 73,50% variabel kualitas pelayanan publik (Y) dijelaskan oleh variabel Perilaku birokrasi X, sedangkan 26,50% lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diamatis dalam penelitian ini. Koefisien korelasi (R) 0,3440 menunjukkan hubungan “sedang” antara variabel bebas dan tidak bebas dalam model regresi ini.

B. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Informasi Manajemen Keuangan

a) Profesionalisme

Penerapan sistem informasi manajemen keuangan memiliki profesionalisme yang signifikan dengan kinerja yang dihasilkan dengan 80,00%, dan kurang profesional hanya 20,00%. Dalam Kenyataan seorang PNS yang sangat jauh yang diharapkan. Kewajibannya seorang pelayan yang bukan lagi tugas utama sebagai Pegawai Negeri Sipil. Mendegar melalui media dan melihat dari cetakan yang mengatakan kurang baiknya sehingga membuat pencitraannya tercoreng. Hal ini merupakan suatu bukti yang autentik yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja PNS.

b) Sistem komputerisasi

Penerapan sistem informasi manajemen keuangan senantiasa menerapkan teknologi computer dalam mengaplikasikan sistem informasi manajemen keuangan dengan 100,00%, dampak positif menggunakan komputerisasi tentu yang pertama mempercepat pengolahan Data, tanpa harus menghitung manual ke dalam sistem komputer dan begitu di klik tombol tertentu data sudah jadi tinggal mengambil kesimpulannya saja. Kedua, mengurangi proses yang

berbelit-belit dan butuh waktu lama. Saat sudah ada sistem komputerisasi, beberapa tahapan dapat digantikan oleh sistem tersebut. Sistem komputerisasi juga membantu untuk mengurangi penggunaan kertas, karena semua dokumen dapat disimpan di komputer tanpa harus di file di kertas. Jika nanti diperlukan baru diprint di kertas.

Umumnya komputerisasi membantu pekerjaan menjadi lebih mudah, akurat dan cepat. Namun komputerisasi tidak bisa berdiri sendiri melainkan membutuhkan program yang akan menjalankan fungsi pengolahan data tersebut, yang sudah di rancang sedemikian rupa (kustomisasi) untuk membantu prosedur manual.

C. Dampak Kualitas Laporan Keuangan

Data laporan dan kinerja keuangan sangat dibutuhkan agar dapat dibuat prediksi ke depannya, termasuk mempersiapkan fitur tambahan yang dibutuhkan. Contohnya fitur pembayaran gaji, data gejala saham, ataupun data kredibilitas perusahaan. Pun data tersebut dapat digunakan sebagai pembandingan untuk memperkirakan laba-rugi, dan melihat pergerakan bagian

pendapatan tertentu agar dapat diantisipasi.

Kemudian berdasarkan 'Azas Materialitas' yang melihat seberapa penting data tersebut berdasarkan isinya. Misalnya, sebuah data bagian baru perusahaan yang secara langsung berpengaruh pada aspek resiko dan peluang.

Kualitas laporan keuangan tidak cukup hanya didukung data yang relevan, melainkan harus diperhatikan potensinya bagi khalayak publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, seperti halnya penggunaan APBD. Informasi berkualitas berisikan data yang tepat dan akurat sehingga penyajiannya pun dapat dipercaya (*faithful representation*), contohnya dalam memecahkan masalah sengketa tuntutan kerugian. Dalam konteks ini, informasi harus berisikan data riil transaksi secara mendetail. Jadi di dalam neraca akan tercatat secara jelas dan lengkap di mana aktiva, kewajiban, dan hak perusahaan. Juga untuk mengurangi resiko di mana informasi tersebut diragukan kebenarannya. Jadi walaupun Meskipun tidak bisa disebut sebagai kesengajaan dalam pelaporan, namun lama kelamaan akan timbul kesulitan baru dalam menampilkan berbagai jenis data transaksi yang benar-benar tepat dan akurat.

Selanjutnya 'Prinsip Keandalan' di mana perusahaan dituntut menyajikan data yang

paling benar dan dapat dibuktikan ataupun ditelusuri kebenarannya, sehingga menghasilkan laporan yang akurat dan berguna, bukan rekaan ataupun pendapat yang tidak berdasar. Namun adakalanya terdapat data yang bersifat tidak pasti sehingga tidak disertakan dalam pelaporan, contohnya kegiatan bersifat amal yang berdasar atas niat baik, namun akhirnya diragukan keandalannya karena tidak bisa diukur. Tetapi juga terkadang laporan tersebut dianggap benar apabila dilakukan untuk menghindari resiko kesalahan tertentu.

Kemudian apabila ada informasi yang harus dilaporkan dengan sebenar-benarnya, maka informasi tersebut sebaiknya disajikan secara substansial, bukan secara hukum yang kadang terasa tidak konsisten dengan substansi kasus. Namun apabila kebenaran data dikedepankan, maka perusahaan harus berpegang pada 'Azas Netralitas', di mana informasi tersebut berada di jalan kepentingan khalayak banyak. Jadi informasi tersebut tidak menguntungkan pihak yang satu dengan jalan merugikan pihak yang lain.

Ketidakpastian seperti ini benar adanya, namun disertai pertimbangan substantif dan *prudence* (sehat dalam laporan keuangan). Pertimbangan sehat berperan sebagai unsur hati-hati agar aktiva tidak terlalu tinggi dan

kewajiban tidak terlalu rendah. Dan dengan pengecualian di dalamnya tidak terdapat banyak penyisihan, tidak menetapkan aktiva lebih rendah dan/atau kewajiban lebih tinggi, yang mana berujung pada kualitas laporan yang tidak netral dan tidak andal.

Di samping itu untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, informasi di dalamnya harus lengkap dari segi materia dan biaya. Kesengajaan tidak mengungkap (*omission*) membuat informasi menjadi tidak benar, tidak relevan, dan tidak andal. Dalam rangka penyajian laporan keuangan, harus dipetakan informasi keuangan secara proporsional dalam suatu periode tahun anggaran, sehingga pemakai anggaran mengenali mana laporan keuangan antar periode untuk melihat mensandingkan laporan keuangan dengan kinerja keuangan dengan Pemakai dengan melakukan perubahan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative. Oleh sebab itu suatu pengukuran keuangan dan peristiwa dilakukan secara konsisten, antar organisasi yang berbeda.

Harus dapat informasi mengenai kebijakan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dengan perubahan bagi pemakai yang dapat mengidentifikasi suatu kebijakan untuk transaksi yang sama dalam sebuah organisasi.

Taat pada rata-rata akuntansi keuangan, ungkapan akuntansi yang digunakan oleh organisasi, untuk mencapai daya banding. Kebutuhan yang tidak seharusnya dikacaukan semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dengan memperkenalkan SAK (standar Akuntansi Keuangan) dengan lebih baik. organisasi tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Jangan terlalu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi ketika ada yang lebih andal. Perbandingan laporan keuangan Informasi organisasi akan bermakna jika ada perbandingan dengan informasi dari instansi lain Dengan di evaluasi dan dilaporkannya dengan tata cara yang sama organisasi-organisasi yang berbeda. Hal ini memberikan kemungkinan bagi para pemakainya untuk mengenali dan menganalisis persamaan atau perbedaan kondisi keuangan berbagai organisasi karena metode akuntansi yang digunakan dapat diperbandingkan. Dalam menyajikan informasi, organisasi harus memberikan perlakuan akuntansi yang sama terhadap transaksi yang sama pada waktu-waktu yang berbeda. Seiring dengan perjalanan waktu, organisasi bisa mengubah metode (perlakuan) akutansinya. Namun jika hal itu dilakukan, maka pada

periode dilaksanakannya perubahan itu organisasi harus mengungkap (dalam laporan keuangannya) tentang berbagai hal yang terkait dengan perubahan itu.

Salah satu informasi yang paling berguna dalam rangka pengambilan keputusan maka laporan keuangan haruslah berkualitas. Karakteristik laporan keuangan yang berkualitas. Karakteristik laporan keuangan yang berkualitas adalah sebagai berikut: prediktif, umpan balik, tepat waktu, lengkap, dan netral.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh system informasi manajemen keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, dapat disebutkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelaporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang senantiasa menerapkan sistem Informasi Manajemen dalam rangka membentuk fostur APBD yang representative dapat dilihat pada dua dimensi: (a) hasil analisis deskriptif tabel frekuensi tanggapan responden terhadap penerapan sistem informasi manajemen keuangan dalam

- pelaporan keuangan daerah: intelegen keuangan 51,43%; audit keuangan 77,14%; transaksi keuangan 91,42%; dan peramalan dan perencanaan keuangan 62,85, secara kumulatif 70,71%; (b) hasil analisis deskriptif statistic imperensial regresi linier sederhana menunjukkan 73,30% kemampuan menjelaskan variabel sistem informasi manajemen keuangan terhadap pelaporan keuangan daerah, maka pengaruhnya signifikan pada taraf kepercayaan 0,05 dengan probabilitas 0,000000 ($t_{hit} 4,12 > t_{tab} 2,73$) $H_1 =$ di terima.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi manajemen keuangan, yaitu: profesionalisme aparat 80,00%; dan sistem komputerisasi dengan 20,00%.
 3. Dampak dari laporan keuangan yang berkualitas disebabkan oleh penerapan sistem informasi keuangan yang efektif, yaitu: menyajikan informasi keuangan: keandalan informasi dan mudah dipahami oleh stakeholders
- DAFTAR PUSTAKA**
- [1] Ahmad, Jamaluddin. 2015, Metode Penelitian Administrasi Publik, Yogyakarta : Gava Media.
 - [2] Akbar, Barhullah, 2002, Fungsi Manajemen Keuangan Daerah, Majalah Pemeriksaan, Edisi No. 87, oktober, hjal. 4-8
 - [3] Azwar, Saifuddin. 2000. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
 - [4] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2013. Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).[http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi 2.1.bpkp](http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi%201.bpkp).(Diakses 20 Mei 2013).
 - [5] Bastian I. 2001.Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta (ID): BPFE.
 - [6] Budiyanto, Nur. 2013. Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Ditinjau Dari Opini BPK-RI.Tesis.Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta. Dipublikasikan.Melalui <http://www.google.com> (Diakses 18 Maret 2013).
 - [7] Fahmi I. 2011.Analisis Kinerja Keuangan. Bandung (ID) : Alfabeta.
 - [8] Halim A. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta (ID): UUP
 - [9] Indrayani, Etin dan Gatningsih. 2013. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
 - [10] Kadir, Abdul. 2014, Pengenalan Sistem Informasi, Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit Andi Yogyakarta
 - [11] Kosasih, Dadang, 2003, Reorientasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Majalah

- [12] Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta (ID) : Erlangga.
- [13] Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta (ID) : Penerbit Andi.
- [14] Mohune, Cipmawati. 2012. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Gorontalo. Tesis. Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
- [15] Nazir M. 2011. Metode Penelitian. Bogor (ID) : Ghalia Indonesia.
- [16] Nurhayani, 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu-Rengat. [Skripsi]. Pekanbaru (ID) : Universitas Islam Riau
- [17] Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : RinekaCipta.
- [18] Ole, Halens Ryanlie. 2013. Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara. Makalah. Melalui ipi 292450.pdf [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=292450&val=5800&tittle=Analisis %201](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=292450&val=5800&tittle=Analisis%201).
- [19] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Reviu LKPD.
- [20] Permadi, Angga Dwi. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Tesis. Universitas Widyatama, Bandung.
- [21] Ridwan. 2009. Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Padjajaran: Bandung. Melalui <http://www.google.com> (Diakses 24 Maret 2013).
- [22] Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke-16. Bandung : CV. Alfabeta.
- [23] Supranto, J. 2000. Statistika Teori dan Aplikasi, Edisi Enam. Jakarta : Erlangga.
- [24] Umar, Husein. 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi I. Jakarta: Rajawali Pers.
- [25] Pemerintah Pusat dan Daerah. Republik Indonesia.